PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jl.	No	Telp	
	BURANGA		

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUTON UTARA NOMOR: 404TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA / OPERSIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUTON UTARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan Program Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan di Kabupaten Buton Utara maka perlu pembukaan dan pendirian unit sekolah baru.
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan Penerapan Lembaga / Izin Operasional satuan pendidikan Tahun 2014 Melalui Keputusan Kepala Dinas Buton Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaga Negara Nomor 1882);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentah Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Buton Utara tentang

Lembaga / Izin Opersional Sekolah Menengah Atas berdasarkan hasil analisis kajiamn sebagaimana tercantum pada

lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini

berkewajiban:

 Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.

 Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan

keputusan ini bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten

Buton Utara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Didetapkan di Buranga

cpala Dinas

DINAS PENDIDIKAN

RS A AHRUL MUHAMMAD, M.Si.

Penabina Ik. NIV/b

MP. 19591231 198603 1 268

Tembusan, Disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- 2. Sckretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
- Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
- 5. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
- 6. Bupati Buton Utara di Buranga
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari